

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN DESA MERAH PUTIH DI DAERAH PEDESAAN**

Muh.Ridwan Malik¹, Karmilah², Abd Rizal³

Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahamah Kolaka

Email: tiarabintang755@gmail.com¹, karmilahramju@gmail.com², abdrizal@usimargmail.com³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program strategis Desa Merah Putih sebagai upaya penguatan perekonomian pedesaan melalui pengembangan koperasi berbasis potensi lokal. Program ini hadir untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dengan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama yang profesional dan berkelanjutan. Koperasi sebagai motor utama diharapkan mampu mengatasi keterbatasan akses modal, mengurangi dominasi tengkulak, memperpendek rantai pasok, serta memperbaiki tata kelola ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), di mana data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta kebijakan pemerintah terkait pengembangan desa dan koperasi. Analisis dilakukan dengan menelaah literatur dan regulasi untuk mengidentifikasi peran tata kelola koperasi, kapasitas sumber daya manusia, modal sosial masyarakat, serta dukungan kebijakan dan teknologi dalam keberhasilan program. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Merah Putih sangat bergantung pada sinergi faktor internal dan eksternal, serta ketahanan terhadap tantangan seperti rendahnya profesionalisme pengelola dan potensi dominasi elit lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi manajemen koperasi, dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini di masa depan.

Kata Kunci: Desa Merah Putih, Koperasi Desa, Pembangunan Pedesaan, Keberhasilan, Faktor Pengaruh.

Abstract – *This study aims to analyze the key factors influencing the success of the strategic program Desa Merah Putih as an effort to strengthen the rural economy through the development of cooperatives based on local potential. The program seeks to promote village economic independence by empowering communities through the professional and sustainable management of collective enterprises. As the main driving force, cooperatives are expected to address limited access to capital, reduce the dominance of middlemen, shorten supply chains, and improve village economic governance. This research employs a qualitative method with a library research approach, in which data were obtained from books, scientific journals, official reports, and government policies related to rural and cooperative development. The analysis was conducted by reviewing literature and regulations to identify the role of cooperative governance, human resource capacity, community social capital, as well as policy and technology support in the program's success. The findings indicate that the success of Desa Merah Putih largely depends on the synergy between internal and external factors, as well as resilience to challenges such as low managerial professionalism and potential dominance by local elites. Therefore, strengthening institutional capacity, improving cooperative management literacy, and fostering synergy between the government, private sector, and community are essential to ensure the program's sustainability and effectiveness in the future.*

Keywords: *Red And White Village, Village Cooperatives, Rural Development, Success, Influencing Factors.*

PENDAHULUAN

Desa Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang digagas untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di pedesaan melalui pembentukan koperasi berbasis prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan nasional. (Heru Nur Wicaksono, S.Pd, 2025)

Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai lembaga ekonomi sosial yang mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam di desa, sekaligus menjadi solusi meningkatkan akses modal, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan implementasi program ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tata kelola koperasi yang akuntabel, kualitas pengelola, modal sosial masyarakat, hingga dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. (Rika Maryam, 2025) Selain itu, proses digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan koperasi turut mempercepat pencapaian tujuan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kunci tersebut agar Desa Merah Putih dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berdampak luas dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan literatur dengan metode deskriptif-kritis, menelaah berbagai sumber seperti kebijakan pemerintah, kajian akademik, dan laporan lapangan terkait pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Analisis difokuskan pada identifikasi tantangan dan peluang yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, termasuk aspek kelembagaan, kapasitas SDM, modal sosial, dan dukungan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan inisiatif besar pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mendorong ketahanan pangan nasional. Sampai Mei 2025, tercatat sudah terbentuk sekitar 40.000 koperasi di berbagai daerah dari target 80.000 unit yang direncanakan, dengan pelaksanaan yang didukung penuh oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Hal ini menunjukkan respons positif masyarakat desa dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan program tersebut.

A. Faktor-faktor keberhasilan desa merah putih antara lain:

1. Dukungan kebijakan dan pendanaan kuat

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan hukum strategis yang mengatur percepatan pembentukan koperasi. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan pendanaan besar, berupa modal awal Rp 3-5 miliar per koperasi dari APBN dan APBD, serta insentif untuk mendukung proses pendirian dan operasional koperasi. Dukungan kebijakan ini sangat menentukan percepatan dan kelancaran pembentukan koperasi serta legitimasi kelembagaan.

2. Keterlibatan lintas sektor dan koordinasi terintegrasi

Keberhasilan program ini tidak lepas dari koordinasi aktif antara kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koperasi, Desa, Pertanian, Keuangan, BUMN, serta pemerintah daerah. Sinergi ini menjamin tersedianya fasilitasi teknis, pelatihan SDM, pengadaan infrastruktur gudang dan cold storage, serta pengawasan pelaksanaan koperasi secara terpadu. (Salsabil et al., 2025)

3. Penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pengelola koperasi

Pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan, dan digitalisasi administrasi menjadi prioritas guna membangun profesionalisme pengelola koperasi di tingkat desa. Pendampingan intensif memperbaiki tata kelola dan menghindarkan praktik penyalahgunaan

dana, yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembangunan koperasi pedesaan. (Febianriza Arzewiniga & Zulkarnain, 2025)

4. Modal sosial dan partisipasi aktif masyarakat desa

Musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai tahap legalisasi koperasi menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan. Saat ini, wilayah seperti Jawa Tengah mencatat dominasi pelaksanaan musdesus dengan lebih dari 7.500 desa yang aktif, sebagai contoh penguatan modal sosial yang mendorong keberlanjutan koperasi.

5. Optimalisasi potensi lokal dan pelayanan terpadu

Koperasi Merah Putih tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan juga sebagai pusat distribusi produk pertanian, gudang penyimpanan hasil tani, dan penyedia layanan dasar seperti sembako murah dan klinik desa. Hal tersebut mampu memperpendek rantai pasok dan mengangkat nilai ekonomi desa secara signifikan, meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendukung ketahanan pangan lokal. (Intensitas et al., 2023)

B. Tantangan yang ditemui dalam implementasi program:

1. Skala dan kompleksitas pembentukan koperasi

Target 80.000 koperasi dalam waktu singkat menuntut kesiapan infrastruktur dan SDM yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Ada risiko ketimpangan layanan dan kualitas pengelolaan koperasi antar desa, terutama di daerah terpencil.

2. Kebutuhan pengawasan dan tata kelola yang kuat

Dengan alokasi dana besar dan otonomi pengelolaan koperasi, potensi penyalahgunaan dana dan pengaruh elite lokal menjadi risiko nyata. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal sangat penting agar koperasi bisa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

3. Adaptasi teknologi dan inovasi digital

Pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi koperasi masih perlu ditingkatkan. Digitalisasi menjadi kunci efisiensi pengelolaan dan akuntabilitas, namun masih ada kesenjangan kapasitas pengurus koperasi di desa yang harus diatasi melalui pelatihan berkelanjutan.

4. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

Keberlanjutan koperasi menuntut komitmen masyarakat yang tidak hanya terbentuk secara formal, tetapi aktif dan konsisten berperan serta dalam pengelolaan koperasi. Membangun pemahaman dan budaya koperasi di tingkat desa menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. (Meylani et al., 2023)

C. Aspek yang mempengaruhi keberhasilan desa merah putih

1. Indikator Keberhasilan Operasional Koperasi

Keberhasilan KDMP tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Dua indikator utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah stabilisasi pasokan bahan pokok dan stabilisasi harga di tingkat desa. Dengan tersedianya pasokan pangan yang terjamin melalui koperasi, harga barang menjadi lebih stabil dan dapat mengurangi gejolak inflasi di daerah pedesaan. Hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi beban biaya hidup dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok sepanjang tahun (Iwan Mulyana et al., 2025).

2. Risiko dan Pentingnya Pengawasan yang Ketat

Mengingat besarnya dana yang dialokasikan mencapai triliunan rupiah risiko penyalahgunaan dana dan gagal bayar pinjaman menjadi sangat nyata. Untuk itu, program ini memerlukan pengawasan internal yang ketat oleh pengurus koperasi serta pengawasan eksternal oleh pemerintah dan aparat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Audit keuangan secara berkala dan pelaporan transparan menjadi aspek krusial untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan semua dana digunakan sesuai tujuan pembangunan ekonomi desa. Tanpa pengawasan yang baik, risiko kegagalan koperasi

dan kerugian negara bisa meningkat, sehingga keberlanjutan program terancam. (Jenderal & Pertahanan, 2025)

3. Perencanaan Matang dan Penguatan Modal Sosial

Keberhasilan koperasi juga sangat dipengaruhi oleh seberapa matang perencanaan usaha yang dibuat oleh pengelola maupun masyarakat desa. Selain aspek teknis bisnis, penguatan “modal sosial” atau social capital sangat menentukan keberlanjutan koperasi. Modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan budaya gotong royong merupakan fondasi bagi kerja sama efektif antar anggota koperasi. Bila nilai-nilai ini kuat, koperasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat bisnis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga desa. (Saputri & Hardiyan, 2025)

4. Keberlanjutan dan Aspek Keuangan Koperasi

Aspek keuangan adalah batu ujian bagi keberlanjutan koperasi. Koperasi harus mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati seluruh anggota sebagai insentif agar mereka tetap aktif dan berkontribusi. Model pengelolaan keuangan yang sehat termasuk pengelolaan cash flow, pinjaman, dan investasi kembali menjadi kunci agar koperasi tidak hanya bergantung pada modal awal pemerintah, tetapi mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri. Perencanaan bisnis yang realistis dan inovatif juga penting agar koperasi tahan terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi. (M Amin & Dedy Suhendi, 2025)

5. Potensi Keuntungan yang Besar dan Efisiensi Operasional

Menurut pejabat Kementerian Koperasi, koperasi desa seperti KDMP memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, bahkan hingga 90% pada beberapa unit usaha. Namun, potensi tersebut hanya bisa dicapai jika pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan efisien, dengan SDM yang kompeten dan sistem kerja yang transparan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pengurus koperasi desa untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi lokal secara maksimal. (Moh. Syarif et al., 2025)

KESIMPULAN

Program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan strategi nasional yang inovatif dan ambisius dalam memperkuat perekonomian desa serta mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hingga Mei 2025, pencapaian pembentukan sekitar 40.000 koperasi menunjukkan respons positif dari masyarakat dan pemerintah daerah terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Keberhasilan program ini sangat ditopang oleh lima faktor utama, yakni: dukungan kebijakan dan pendanaan yang kuat, keterlibatan lintas sektor, penguatan SDM, partisipasi aktif masyarakat, serta optimalisasi potensi lokal melalui pelayanan koperasi yang terpadu. Meski demikian, pelaksanaan KDMP juga menghadapi tantangan signifikan, mulai dari kompleksitas pembentukan koperasi, kebutuhan pengawasan ketat, kesenjangan adaptasi teknologi, hingga pentingnya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Risiko penyalahgunaan dana dan ketimpangan kualitas antar daerah menuntut sistem tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, serta pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari jumlah unit yang terbentuk, tetapi juga dampak nyata dalam stabilisasi harga, peningkatan kesejahteraan, dan efisiensi distribusi pangan di desa. Keberlanjutan program sangat bergantung pada perencanaan usaha yang matang, penguatan modal sosial masyarakat, manajemen keuangan koperasi yang sehat, serta profesionalisme pengelola koperasi. Dengan potensi keuntungan tinggi dan kontribusi strategis bagi ekonomi desa, KDMP dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen bersama, integritas, serta peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Suhendi, D. (2025). KOLABORASI MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT MELALUI PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI PAGESANGAN BARAT KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM. *JURNAL PENGABDIAN BINA MASYARAKAT*, 1(2), 9-18.
- Arzewiniga, F. (2025). TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2).
- Intensitas, T., Haid, N., & Dismenore, P. (2023). *Jurnal Manajemen dan*. 5(2), 41–49.
- Jenderal, D., & Pertahanan, P. (2025). PENDISTRIBUSIAN OBAT LAFI TNI : 2025(07).
- Maryam, R. (2025). PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17-37.
- Moh. Syarif, Suhaimi, & Hajjatul Mabruroh. (2025). Desain Koperasi Desa Masa Depan Sebagai Alternatif Strategis Untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 8(01), 53–65. <https://doi.org/10.56998/2r6h6j13>
- Mulyana, I., & Ermaya, K. (2025). Transformasi Sumber Daya Manusia Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Inovatif Membangun Profesionalisme dan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *Book Chapter Universitas Koperasi Indonesia*, 145-152.
- Salsabil, H. H., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden A Legal Review Under Administrative Law on the Formation of Merah Putih Village Cooperatives Through Presidential Instruction. 8(2), 901–922.
- Saputri, A. R., & Hardiyana, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. 3, 95–106.
- Wicaksono, H. N. (2025). Apa dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penerbit NEM.